

Masalah dan Prospek Kelembagaan di Bidang Politik

Sarwono KUSUMAATMADJA

Di masa lalu, kehidupan politik di tanah air memperlihatkan perkembangan-perkembangan berikut: *pertama*, pada jaman demokrasi parlementer, dipertarungkan konsep-konsep politik yang pada dasarnya berkisar pada paham serta bentuk negara. Karena bentuk serta paham negara merupakan isu yang amat fundamental, maka konflik politik di masa itu amat sengit; kenyataan bahwa perdebatan yang demikian fundamental terjadi pada saat di mana bangsa kita masih muda dengan segala kekurangannya, menyebabkan krisis demi krisis politik bermunculan dan dapat diselesaikan hanya dengan mekanisme darurat melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959. *Kedua*, di dalam masa Demokrasi Terpimpin, kita melihat adanya usaha untuk menuntaskan masalah-masalah fundamental di atas dengan mengikat komitmen bangsa pada Pancasila dan UUD 1945. Usaha tersebut tidak berhasil, karena kenyataan obyektif yaitu bahwa kehidupan politik masih bersifat multi ideologi, sesuatu yang muskil dipersatukan dalam Pancasila. Kita boleh mengecam Bung Karno dengan politik Nasakomnya, namun jika kita merenungkan kembali pilihan-pilihan yang terbuka bagi dirinya pada waktu itu, setidaknya-tidaknya kita dapat memahami betapa sulitnya berhadapan dengan faktor obyektif berupa hadirnya secara sah kekuatan-kekuatan riil yang satu dengan lainnya secara antagonistik bertentangan. Konflik ideologi yang tajam merupakan konsekuensi dari perkembangan politik di masa itu, dan puncak konflik tersebut meletus dengan Pemberontakan G-30-S/PKI.

Jika kita mengambil hikmah dari kejadian masa lalu tersebut dari sudut kelembagaan, maka secara menyeluruh dapat ditarik suatu kesimpulan bersama dari dua jaman berbeda di atas, yaitu bahwa kelembagaan politik di masa itu ternyata tidak dapat berfungsi dalam "management of conflict," atau dalam memelihara keseimbangan antara konflik dengan konsensus. Orde Baru telah membuktikan dirinya mampu dalam "management of conflict"

tadi. Hal ini disebabkan karena kemampuannya untuk mengambil pelajaran sejarah yang tepat, dan juga berkat kepemimpinan yang efektif, termasuk efektif dalam mengambil langkah-langkah yang sudah lama ditunggu oleh bangsa kita, yaitu pembangunan nasional di segala bidang kehidupan. Dari segi pembangunan politik maka prestasi terbesar dari Orde Baru adalah tertanamnya legitimasi kelembagaan politik Orde Baru, baik supra maupun infrastrukturnya, serta ditetapkannya Pancasila sebagai satu satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini berarti bahwa masalah-masalah penting di bidang politik, baik yang bersifat fundamental berupa paham serta bentuk negara, maupun yang bersifat struktural yaitu masalah kelembagaan, telah selesai. Walaupun dalam beberapa hal dapat dikatakan bahwa penyelesaian tersebut berada dalam tahapnya yang dini, yaitu tahap legal dan formal. Konflik merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan politik. Bahkan dapat dikatakan bahwa kehidupan politik adalah rangkaian yang tidak henti antara konflik dengan konsensus. Dari segi ini, maka lembaga-lembaga politik berperan untuk menangani konflik demi tercapainya konsensus. Peran ini diemban sesuai dengan fungsi yang melekat pada tiap lembaga politik apakah supra maupun infrastruktur sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh konstitusi. Penetapan Pancasila sebagai satu-satunya asas mempunyai makna bahwa sifat konflik politik sudah bergeser, yaitu bukan lagi mengenai paham dan bentuk negara, tetapi mengenai pilihan-pilihan yang harus ditempuh atas dasar yang sekarang sudah diakui sama, yaitu Pancasila, dan atas dasar ketentuan-ketentuan ketatanegaraan yang sama pula yaitu UUD 1945. Di masa yang akan datang kelembagaan politik kita akan dihadapkan pada serangkaian konflik dan konsensus terus-menerus yang terjadi dalam menangani pilihan demi pilihan yang timbul di atas kesamaan dasar di atas. Kita tidak mempunyai pilihan lain kecuali membangun kelembagaan politik yang senantiasa dapat efektif, karena taruhannya adalah besar, yaitu Pancasila dan UUD 1945 itu sendiri. Krisis politik yang besar di masa yang akan datang dapat mengundang terpikirkannya alternatif-alternatif lain sehingga kehidupan politik kita dapat mengalami regresi ke masa-masa lalu yang penuh gejolak. Stabilitas politik yang telah demikian lama kita nikmati memang mengandung hikmah, yaitu terciptanya iklim yang memungkinkan terwujudnya perikehidupan di segala bidang yang makin baik. Tetapi di sisi lain dapat membuai kita untuk melupakan pahit getirnya sejarah pertumbuhan bangsa, serta memunculkan gagasan-gagasan yang terlepas dari konteks kebangsaan kita, serta tidak konsisten dengan arah pertumbuhan selama ini.

Krisis politik yang besar di masa yang akan datang hanya dapat dihindarkan, jika pembangunan politik dapat kita tempatkan dalam konteks kontinuitas serta pembaharuan. Hal ini menuntut stabilitas serta dinamika sekaligus. Kontinuitas kita perlukan supaya perjalanan sejarah bangsa selalu

konsisten dengan cita-cita kemerdekaan kita; sedangkan dinamika pembaharuan selalu juga diperlukan karena pembaharuan adalah tuntutan obyektif dari bangsa yang membangun. Kontinuitas serta pembaharuan dapat dijamin lewat terciptanya sistem politik yang efektif dalam arti bahwa sistem politik tadi, selain konsisten berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, juga mampu menghadapi tantangan-tantangan jaman dengan daya adaptasi yang sepadan. Dengan daya adaptasi yang demikian, maka dapat dihindarkan kecenderungan untuk memelihara status quo semata-mata, yang pada gilirannya hanya mampu memelihara kehidupan politik dengan penggunaan kekuasaan yang berlebihan. Penggunaan kekuasaan yang berlebihan pada gilirannya pula akan menciptakan perlawanan yang semakin keras, sehingga kekuasaan yang bersikap terbelakang akhirnya juga tidak akan efektif, karena tidak lagi mampu menangani konflik hanya sebagai konflik politik semata-mata. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa di masa mendatang karena bentuk serta paham negara sudah tidak lagi menjadi masalah, maka kita perlu berusaha supaya Pancasila dan UUD 1945 kita lestarikan dengan upaya pembangunan politik yang dinamis dan demokratis sehingga kepentingan-kepentingan masyarakat yang demikian beraneka ragam dan tuntutan-tuntutan yang meningkat dapat diolah dalam kehidupan politik kita.

Dewasa ini kita mempunyai cukup alasan untuk bersikap optimis bahwa perkembangan kehidupan politik menuju ke arah yang terbuka dan demokratis karena perdebatan-perdebatan politik yang kita saksikan selama pembahasan kelima RUU bidang politik telah menunjukkan arah yang wajar dan sehat. Sebagai contoh, berkali-kali Presiden Soeharto menekankan dalam berbagai kesempatan bahwa Pancasila bukanlah ideologi yang kaku dan dogmatis. Demikian juga para politisi yang merupakan pembawa ide Pancasila sebagai satu-satunya asas mengaitkan Pancasila sebagai bagian dari upaya untuk menegakkan kehidupan demokratis. Para cendekiawan kita dari berbagai latar belakang budaya telah sama-sama memberikan pembenaran bahwa Pancasila adalah suatu ideologi yang terbuka, yang bukan saja berakar dari budaya bangsa namun juga mampu menyerap hal-hal yang menguntungkan pertumbuhan bangsa dari berbagai paham yang hidup di dunia ini. Di pihak lain kita juga sudah kurang mendengar adanya nada-nada yang bersikap defensif mengenai Pancasila, yaitu misalnya ucapan bahwa Pancasila bukanlah isme ini atau itu, tanpa mampu menjelaskan apa sebenarnya Pancasila itu. Kecenderungan untuk bersikap totaliter mengenai Pancasila, sehingga mempancasilakan segala hal termasuk sepak bola juga sudah lama tidak kita lihat. Optimisme ini layak juga kita tampilkan jika kita lihat kembali bahwa proses diterimanya Pancasila sebagai satu-satunya asas bukanlah proses pemaksaan tetapi ditempuh melalui proses yang evolutif. Gagasan untuk menawarkan Pancasila sebagai satu-

satunya asas pernah dikemukakan oleh Bung Karno setelah Dekrit Presiden, namun ditampik oleh PKI. Selama Orde Baru, gagasan ini telah menyatu dengan perjuangan Orde Baru sejak awal. Oleh karena itu dapatlah dikatakan bahwa Pancasila akhirnya diterima sebagai satu-satunya asas karena kesadaran sejarah bahwa kita memang tidak mempunyai alternatif lain. Proses penerimaan asas tadi tidaklah sepi dari konflik namun konflik yang terjadi mampu ditangani dalam kelembagaan politik kita. Usaha-usaha untuk menciptakan konflik yang keras dalam masyarakat mengenai masalah ini ternyata tidak mendapat dukungan luas dari masyarakat itu sendiri. Hal ini merupakan bukti bahwa legitimasi lembaga-lembaga politik kita sudah bersifat nyata.

Daya adaptasi sistem politik kita juga terbukti dari pembaharuan yang dilakukannya menyangkut susunan lembaga-lembaga perwakilan kita. Susunan tersebut diatur menurut ketentuan perundang-undangan yang disusun sebelum Pemilu 1971, yaitu melalui UU No. 16 Tahun 1969, di mana $\frac{1}{3}$ anggota MPR diangkat dari Golongan Karya ABRI. Pengangkatan ini dilakukan untuk menjamin bahwa Pemilu tidak akan menghasilkan suatu susunan yang memungkinkan dipersoalkannya kembali UUD 1945. Proses pembudayaan Pancasila selama Orde Baru serta meningkatnya kesadaran akan Pancasila sebagai satu-satunya alternatif ideologi menyebabkan perlunya ditempuh cara-cara yang lebih demokratis dalam menjamin bahwa UUD 1945 tidak dapat diubah oleh siapapun. Oleh karena itu diputuskan bahwa di masa yang akan datang, perubahan terhadap UUD hanya dapat dilakukan melalui referendum. Dengan adanya mekanisme referendum itu, maka pengangkatan dalam lembaga perwakilan dapat dikurangi secara relatif dan adanya pengangkatan dititikberatkan untuk mewedahi pengakuan kita semua terhadap fungsi sosial politik ABRI. Suasana keterbukaan dalam merumuskan ide-ide politik serta kecenderungan adaptif dari sistem politik kita menunjukkan bahwa suatu tradisi politik yang penting mulai membudaya dalam masyarakat, yaitu kemauan untuk bersikap inovatif kendatipun sikap inovatif itu mungkin hanya memenuhi selera pembaharuan yang terbatas saja. Jika keterbukaan serta kemampuan adaptasi yang sifatnya moderat ini kita lihat sebagai awal terciptanya tradisi politik kita, maka kita pun patut optimis bahwa di masa yang akan datang tuntutan akan kontinuitas serta pembaharuan sekaligus dapat senantiasa dipenuhi.

Indikasi yang dapat kita catat untuk mendukung adanya kecenderungan untuk pemantapan peranan kelembagaan adalah adanya pembenahan fungsi dari aparatur pemerintah di bidang politik maupun ekonomi dalam rangka pelaksanaan Pancakrida Kabinet Pembangunan IV. Di bidang politik terlihat adanya keinginan kuat dari pemerintah untuk membatasi peranannya dalam penataan infrastruktur politik sejauh hal itu masih sesuai dengan peranan pemerintah sebagai pembina politik dalam negeri menurut ketentuan hukum

yang ada. Memang terdapat kalangan politisi yang tidak awas akan perkembangan ini, dan kemudian menstimulasi pertentangan intern dalam rangka memanfaatkan intervensi pemerintah untuk keuntungan kelompoknya. Namun ternyata ulah yang demikian tidak lagi mendapat tanggapan yang sebanding dengan jerih payah yang diperlihatkan. Hal lain yang positif adalah penitikberatan fungsi dari Kopkamtib dewasa ini sebagai aparatur sekuriti. Di masa lalu ada kesan yang kuat bahwa lembaga Kopkamtib tidak hanya berfungsi sebagai aparatur sekuriti saja namun juga memegang peranan sebagai manajer krisis, di mana suatu lembaga yang mengalami kesulitan dalam mengemban tugas secara semestinya kemudian untuk sementara "diambil alih" oleh Kopkamtib. Walaupun mungkin ada kasus di mana kecenderungan ini dapat dimengerti, namun kebiasaan seperti ini jika dibiarkan dapat menyebabkan hilangnya kapasitas lembaga-lembaga kita untuk berfungsi baik. Belakangan ternyata kebiasaan-kebiasaan yang bersifat intervensi yang disfungsional semacam ini sudah hilang. Di bidang ekonomi terdapat usaha-usaha yang sungguh-sungguh untuk menata aparatur dalam menghilangkan penghambat-penghambat yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Walaupun tindakan-tindakan ini patut dipuji namun masih ada perasaan yang luas di masyarakat yang khawatir bahwa tindakan ini semata-mata bersifat reaktif terhadap gejala resesi dunia. Kekhawatiran ini timbul karena pembenahan yang terjadi menyangkut sektor-sektor yang telah lama dituntut untuk berlaku lebih efisien terlepas dari adanya kesulitan ekonomi yang kita hadapi.

Jika ingin disimpulkan dari uraian di atas apa yang harus dicapai dalam kelembagaan kehidupan politik kita maka dapat dikatakan bahwa penataan di bidang kelembagaan politik perlu diteruskan dalam semangat yang tampak selama ini, yaitu keterbukaan, daya adaptasi terhadap tuntutan lingkungan serta kebutuhan untuk berperan secara fungsional. Tuntutan akan kontinuitas serta pembaharuan sekaligus mensyaratkan bahwa perubahan-perubahan yang timbul haruslah bersifat gradual dan konsisten. Gradual dalam arti kata, bahwa lembaga-lembaga politik kita hanya dapat diharapkan berfungsi jika kepemimpinannya dapat dipahami oleh taraf kesadaran masyarakat yang umum. Seperti halnya dinyatakan dalam pepatah Minang bahwa kepemimpinan itu cukup "ditingkatkan seranting dan didahulukan selangkah." Kepemimpinan politik sekalipun mungkin memenuhi persyaratan yang ideal, akan terasing dari masyarakat lingkungannya jika ingin mencapai taraf yang mungkin cocok untuk tingkat kesadaran politik yang lebih tinggi. Karena demokrasi dalam pengertiannya yang canggih, sebagai suatu misal, hanya dapat berfungsi baik dalam suatu masyarakat di mana disiplin sosialnya sudah tinggi dan di mana tingkat kemandirian anggota masyarakatnya sudah memadai. Sebaliknya kepemimpinan lembaga politik akan tidak dihormati masyarakat, malahan akan menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial jika kepemim-

pinan tersebut tidak sensitif terhadap perkembangan masyarakat yang menuntut kualitas kepemimpinan yang lebih baik serta kelembagaan yang lebih responsif. Konsistensi diperlukan supaya terdapat perkembangan yang seimbang di antara berbagai lembaga politik yang berperan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ketimpangan dalam peranan dan fungsi akan menimbulkan potensi konflik antar lembaga di luar aturan permainan yang wajar dan lazim, sehingga mengundang adanya intervensi yang bersifat disfungsi dari lembaga politik yang relatif lebih dominan. Di samping itu, inkonsistensi akan menciptakan iklim ketidakpastian dalam masyarakat karena tidak terdapatnya suatu kecenderungan umum yang dapat dijadikan tolok ukur untuk bertindak. Konsistensi juga dituntut dalam mengembangkan fungsi dan peran lembaga politik sesuai dengan sifat yang melekat pada lembaga itu, sesuai dengan isi maupun jiwa UUD 1945.

Selama ini peranan dominan dalam pembangunan politik diambil oleh pemerintah sebagai lembaga politik yang efektif dalam alam Orde Baru. Hal ini tidak perlu diherankan karena Orde Baru berangkat dari situasi di mana pemerintah merupakan satu-satunya lembaga kekuasaan yang efektif. Komitmen pemerintah terhadap demokrasi sudah terbukti dengan fakta bahwa tiap inisiatif politik pemerintah disalurkan melalui lembaga-lembaga politik lainnya seperti lembaga perwakilan kita, sesuai fungsi dan peranan yang dituntut oleh konsepsi yang hendak dijadikan landasan kebijakan. Akan tetapi adalah mustahil untuk mengharapkan adanya keputusan prinsipial di bidang politik yang dilancarkan tanpa adanya inisiatif pemerintah lebih dahulu. Walaupun secara keseluruhan peranan pemerintah ini positif, di masa lalu seperti diuraikan di muka terdapat gejala bahwa intervensi pemerintah di sana-sini masih bersifat disfungsi. Selama belum ada kemapanan fungsi, maka hal-hal yang disfungsi memang adakalanya dapat dibenarkan. Namun perlu diingat bahwa strategi politik Orde Baru itu sendiri pada gilirannya akan menumbuhkan fungsi serta peran yang makin lama makin menonjol dari lembaga-lembaga politik lainnya. Kehendak untuk menciptakan kerangka landasan pembangunan di segala bidang kehidupan merupakan indikasi dari arah yang kita tempuh. Hal ini disadari oleh pemerintah terbukti dari kurangnya intervensi yang disfungsi tadi. Jadi secara gradual, memang sudah terjadi pembaharuan dalam sikap politik kita. Namun kiranya masih perlu ditingkatkan konsistensi dari gejala ini, dengan langkah-langkah yang nyata untuk menciptakan peran, fungsi maupun bobot dari lembaga kekuasaan lainnya seperti lembaga perwakilan serta lembaga peradilan kita.

Prospek ke arah majunya peranan kelembagaan politik kita akan senantiasa cerah seiring dengan adanya komitmen yang teguh dari para penyelenggara negara untuk selalu mendekatkan diri pada cita-cita kemerdekaan bangsa. Cita-cita luhur ini hanya dapat ditempuh jika terwujud persamaan nasib dan

cita-cita pula dalam masyarakat luas, karena persamaan nasib dan cita-cita inilah yang telah membentuk negara bangsa Indonesia. Dengan demikian upaya-upaya politik di masa mendatang harus menempatkan perwujudan solidaritas sosial dalam perikehidupan kebangsaan kita. Perwujudan solidaritas sosial amat penting di masa-masa dekat ini karena proses pembangunan nasional kita mengalami tantangan-tantangan berat, antara lain disebabkan oleh adanya resesi dunia yang mempunyai dampak yang langsung merugikan pembangunan ekonomi kita yang merupakan titik berat pembangunan nasional. Penderitaan yang diakibatkan oleh permasalahan ekonomi yang memuncak hanya akan dapat ditanggung bebannya oleh semua pihak jika suasana solidaritas sosial dapat diciptakan. Sebaliknya jika terdapat perasaan maupun bukti yang meluas bahwa beban permasalahan ekonomi ditanggung secara tidak adil oleh sebagian masyarakat, sedangkan bagian masyarakat lain yang relatif lebih makmur seolah-olah tidak memikul beban yang sepadan, maka tidak dapat dipersalahkan jika terjadi pula kemerosotan disiplin sosial karena menipisnya solidaritas bangsa. Dalam suasana ini kecemburuan sosial amat mudah tercipta sehingga sekat-sekat pemisah bangsa yang telah dikikis habis dengan perjuangan politik yang demikian lama, dapat tumbuh kembali dalam bentuk-bentuk yang mungkin tidak mampu kita lihat perwujudannya dewasa ini. Kemungkinan ini harus dapat kita antisipasikan secara dini, supaya usaha-usaha untuk memerankan lembaga-lembaga politik kita dalam upaya mewujudkan solidaritas sosial ini dapat terus-menerus dilakukan.

Seperti telah diuraikan di atas, suasana politik dewasa ini amat menguntungkan karena, menurut istilah Nurcholis Madjid, dewasa ini terdapat gejala konvergensi nasional. Kecenderungan konvergensi nasional ini, jika dikaitkan dengan upaya-upaya pembentukan solidaritas sosial yang nyata akan memberikan makna yang amat berharga bagi kehidupan kebangsaan kita. Di lain pihak kecenderungan konvergensi nasional jika tidak mampu menciptakan solidaritas sosial, hanya akan memperkuat perasaan bahwa yang terjadi tidaklah lebih dari sekedar pemusatan dari berbagai hal, baik kekuasaan maupun sumber daya. Sukar untuk mengharapkan terwujudnya disiplin sosial dalam suasana semacam ini, dan dapat terbayang besarnya energi serta upaya yang harus dilakukan untuk memelihara konvergensi nasional jika perasaan-perasaan semacam itu dibiarkan meluas

Tantangan seperti dilukiskan di atas menggarisbawahi betapa besar seharusnya komitmen kita terhadap Pancasila dan UUD 1945, karena pengamalan Pancasila di masa mendatang tidak mustahil harus kita laksanakan dalam suasana yang jauh dari ideal, di mana akan terdapat kondisi-kondisi obyektif yang dapat memancing orang untuk memikirkan alternatif-alternatif lain. Kemungkinan dimasyarakatkannya alternatif lain tidak boleh diremehkan dalam abad modern ini karena kita tidak mempunyai

pilihan lain kecuali bersikap terbuka, yang berarti pula terbuka bagi gagasan-gagasan yang datang di tengah-tengah kita melalui berbagai cara. Ketertutupan bukanlah jawaban, karena ketertutupan terbukti telah merupakan eksperimen yang gagal, bahkan bagi negara-negara yang menganut ideologi yang tertutup. Karena komitmen terhadap Pancasila berarti pula komitmen terhadap demokrasi sesuai dengan hakikat Pancasila sebagai ideologi yang demokratis, maka tugas pengamalan Pancasila harus juga kita laksanakan dengan semangat demokrasi tersebut. Hal ini berarti pula bahwa di masa mendatang ini, usaha yang lebih besar harus kita curahkan untuk mempertinggi derajat kemandirian masyarakat dalam pengamalan Pancasila, dan tidak hanya mengandalkan diri dari perkembangan badan-badan politik formal yang kita punyai. Dengan demikian masyarakat harus pula ditingkatkan peranannya sebagai asset nasional dalam pembangunan, sebagaimana dinyatakan dalam GBHN. Kesadaran ideologis masyarakat akan merupakan penangkal yang berharga bagi usaha-usaha untuk penyusupan ideologis pihak lain. Oleh karena itu maka suatu tinjauan mengenai peranan lembaga-lembaga masyarakat menjadi penting, karena tantangan-tantangan masa depan memerlukan pengerahan yang maksimal dari seluruh sumber daya kita. Kuatnya peranan lembaga masyarakat dapat merupakan sumbangan yang berharga terhadap prospek kelembagaan politik kita, karena walaupun lembaga masyarakat tidak mempunyai fungsi politik yang langsung, namun sebagai kumpulan manusia yang terorganisasi maka lembaga masyarakat merupakan bagian yang penting dari infrastruktur politik kita.

Dari segi politik, pentingnya pertumbuhan lembaga masyarakat dapat dirumuskan sebagai berikut: Bagaimanapun juga, politik adalah seni untuk mewujudkan hal-hal yang mungkin. Baik-buruknya kemungkinan yang dapat kita pertimbangkan dalam banyak hal amat tergantung dari kemampuan kita bukan saja dalam melihat kemungkinan-kemungkinan yang ada, namun juga dalam melihat kemungkinan-kemungkinan yang dapat ditumbuhkan. Seringkali, terbatasnya kemungkinan yang ada hanya mampu menciptakan tindakan politik yang jika diukur semata-mata dari segi normatif, tidaklah memadai. Oleh karena itu jika kita menginginkan terciptanya kemungkinan yang lebih baik di masa mendatang, maka kita harus mampu menciptakan iklim yang lebih baik, agar kemungkinan yang dapat kita pertimbangkan di masa mendatang dapat secara normatif kita nilai lebih baik pula. Tumbuhnya swadaya masyarakat berperan dalam menciptakan kemungkinan yang normatif lebih baik itu, karena masyarakat yang mandiri serta berswadaya adalah tulang punggung kehidupan politik yang demokratis. Jika lembaga masyarakat yang tumbuh tersebut terdiri dari Pancasilais yang tangguh, maka prospek kelembagaan politik di masa depan senantiasa cerah, tidak semata-mata tergantung dari mutu kehidupan politik yang dewasa ini kita alami.